

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menghadapi dinamika pembangunan di masa kini yang begitu cepat, masyarakat diharuskan agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah. Pada satu sisi Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah diharuskan pula untuk bisa mengawal perubahan-perubahan tersebut sehingga tidak menyusahkan masyarakat bahkan bisa mempermudah masyarakat dalam membangun kehidupannya yang lebih baik atau meningkatkan kesejahteraannya.

Mensejahterakan masyarakat adalah tugas dan urusan pemerintah yang harus dan wajib dilaksanakan. Dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa melaksanakan segala hal termasuk pembangunan di segala bidang. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan tersebut semata-mata harus selalu untuk masyarakat. Sebesar dan sekecil apapun sesuatu yang pemerintah lakukan harus selalu berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan masyarakat, sebab kebutuhan dan keinginan masyarakat inilah yang menentukan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan-pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan perencanaan dan bantuan dari para *stakeholders* (pemerintah, masyarakat dan swasta).

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menetapkan tujuan dan arah suatu pembangunan. Perencanaan pembangunan akan lebih bermanfaat bagi masyarakat apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi apa yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya pemerintah membutuhkan bantuan dan partisipasi masyarakat untuk merealisasikan perencanaan tersebut. Partisipasi tersebut pun dapat dilakukan dalam berbagai cara salah satunya adalah membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan sumbangan sukarela dari masyarakat yang disumbangkan dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan suatu kegiatan dengan tidak mengorbankan kepentingan yang bersangkutan. Sedangkan, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan pembangunan dimana pilihan-pilihan rencana pembangunan dibuat dilakukan bagi kepentingan masyarakat. Jika dikaitkan antara partisipasi masyarakat dengan perencanaan pembangunan maka akan didapat suatu istilah yang disebut dengan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Didalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, perencanaan pembangunan harus benar-benar disusun untuk memenuhi

semua keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tentu saja membutuhkan peran serta dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan hal-hal apa saja yang diinginkan masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan media atau wadah yang menjangkau sebanyak mungkin partisipasi dan aspirasi masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah salah satu forum umum yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menampung dan merealisasikan usulan-usulan pembangunan dari masyarakat yang diajukan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut. Musrenbang sendiri dapat diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun Provinsi dengan bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini Penulis mengambil permasalahan tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang di Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku.

Kecamatan Seram Timur Merupakan salah satu Kecamatan induk di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dimulai dari awal pembentukan kecamatan ini hingga sekarang, wilayah kecamatan Seram Timur ini telah dimekarkan beberapa kali menjadi beberapa kecamatan pemekaran baru,

diantaranya Kecamatan Gorom, Kecamatan Bula, Kecamatan Totok Tolo, dan Kecamatan Wakatei.

Ibu kota dari Kecamatan Seram Timur ini adalah Geser. Geser merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah timur pulau Seram. Kecamatan Seram Timur ini sendiri terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil berpenghuni dan ada juga yang tidak berpenghuni.

Jarak antara satu desa dan desa lain di kecamatan ini pun berjauhan. Ada desa yang dipisahkan dengan hutan belantara tanpa jalan penghubung dan ada juga yang saling dipisahkan dengan lautan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Seram Timur ini sudah rutin dilakukan walaupun hasil yang diperoleh masih sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan ini masih terdapat banyak faktor penghambat dalam mendatangkan partisipasi dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang masih sangat kurang.

Selain itu berdasarkan kegiatan-kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sebelumnya di Kecamatan Seram Timur ini, sebagian besar proses penyusunan perencanaan pembangunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih diatur sepihak oleh pemerintah sehingga masyarakat beranggapan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Seram Timur hanyalah formalitas

belaka. Karena sebenarnya rencana-rencana pembangunan di Kecamatan ini telah diatur sebelumnya oleh pemerintah dan kemudian mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan kecamatan yang hanya sebagai ceremonial dan formalitas saja.

## **1.2. Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam keterlibatan dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan Musrenbang, Masyarakat merasa jenuh dengan pelaksanaan Musrenbang.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.
3. Dalam proses perencanaan dan pembangunan, dominasi pemerintah sangat besar.
4. Masyarakat beranggapan bahwa usulan-usulan yang mereka sampaikan sangat susah untuk direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan.
5. Letak antara desa-desa dengan ibu kota kecamatan yang jauh menyebabkan masyarakat sulit hadir dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu mengenai Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Seram Timur dalam Pelaksanaan Musrenbang, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Musrenbang, dan upaya dari pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Dari identifikasi dan perumusan masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Seram Timur berhubungan dengan sumbangsih sukarela, pengambilan keputusan, menjalankan program dan evaluasi ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Seram Timur tahun 2011, baik faktor pendorong maupun faktor penghambat ?
3. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Pemerintah kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Seram Timur ?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberi gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Seram Timur.
2. Memberi gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Seram Timur, baik itu faktor pendorong maupun faktor penghambat.
3. Memberi gambaran upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Seram Timur.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Seram Timur.
3. Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang berharga sesuai dengan perkembangan ilmu Pemerintahan.

### **1.4.2 Kegunaan praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di daerah nanti;
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang;
- c. Bagi IPDN, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para Praja IPDN di masa mendatang.